

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mandiri berdiri sendiri, bukan anak cabang dari sebuah perusahaan. Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya dan dapat membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. UMKM tergolong kedalam sektor riil yang memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis ekonomi.

Berdasarkan data tentang kontribusi UMKM di Indonesia yang diakses di www.depkop.go.id menjelaskan bahwa kontribusi sektor usaha mikro kecil dan menengah terhadap Produk Domestik Bruto meningkat pada tahun 2012 sampai tahun 2013 sebanyak Rp 844.978,7 miliar atau 17,35%. Serapan tenaga kerja juga meningkat pada tahun 2013 sebanyak 895.717 orang, tahun 2014 sebanyak 1.146.795 orang dan tahun 2015 sebanyak 1.487.048 orang. Kontribusi UMKM menurut data dari Kementerian KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) yang didasarkan pada perhitungan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2015 yaitu untuk Produk Domestik Bruto sebesar 61,41% dan tenaga kerja sebesar 96,71%. Dari data tersebut, terbukti bahwa UMKM sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja dan mampu meningkatkan perekonomian.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur pada UU No. 20 Tahun 2008. (www.bi.go.id). Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka UMKM mendapat jaminan dan keadilan usaha, selain itu dapat meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam pemerataan dan peningkatan ekonomi, pendapatan rakyat dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut Kristanto (2011), Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Statistik UKM mengatakan bahwa upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya baik dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi Usaha Kecil Menengah melalui pembentukan modal tetap (investasi). Namun terkadang UMKM masih mengalami masalah tentang permodalan, kekurangan modal maupun kehabisan modal. Pemerintah sudah mencoba membantu mengatasi permasalahan tersebut seperti melakukan pembinaan dan pemberian kredit untuk usaha. Permasalahannya yang terjadi lagi, dalam melakukan pinjaman sebagai modal usaha pelaku UMKM harus bisa menunjukkan/mempunyai laporan keuangan usahanya. Lembaga pemberi pinjaman harus menerima laporan keuangan peminjam modal karena untuk mengetahui kinerja perusahaan tersebut, mempertimbangkan layak atau tidaknya diberi pinjaman dan seberapa besar jumlah yang layak untuk diberikan pinjaman pada perusahaan tersebut.

Namun UMKM masih mempunyai beberapa permasalahan, seperti hasil penelitian yang dilakukan Elisabeth, dkk (2012) membuktikan bahwa UMKM mengalami kendala-kendala dalam usahanya salah satunya yaitu masalah pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi. Pelaku UMKM tidak atau belum melakukan penerapan akuntansi sesuai standar. Sebagian dari mereka hanya melakukan pencatatan dan penghitungan selisih uang masuk dan uang keluar. Hal yang terpenting bagi pelaku UMKM adalah cara menghasilkan laba yang banyak tanpa repot melakukan pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi. Seringkali dalam usaha skala kecil menengah menilai usaha bagus jika pendapatan sekarang lebih besar dari pendapatan sebelumnya. Padahal indikator keberhasilan dari sebuah usaha bukan hanya dinilai dari besar pendapatan ataupun labanya, diperlukan akuntansi yang disebut laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangannya. Hasil penelitian Alfitri dkk. (2014) tentang penerapan SAK ETAP pada UMKM Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM tersebut tidak melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan belum dipahami oleh pelaku UMKM. Padahal dengan adanya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui kinerja perusahaan, perputaran dan posisi dana, informasi perhitungan pajak dan memudahkan kerjasama yang terkait keuangan ketika akan melakukan penambahan modal

dengan peminjaman di Lembaga Keuangan (Bank) untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Warren (2006), Akuntansi bermanfaat untuk menghasilkan laporan yang berfungsi sebagai sumber informasi utama yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh Kreditor (Bank) untuk mengambil keputusan apakah UMKM tersebut layak diberikan pinjaman modal atau tidak. Walaupun UMKM tersebut memiliki prospek yang bagus tetapi tidak melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sehingga pihak Kreditor (Bank) tidak mengetahui kinerja perusahaan, maka tidak mudah bagi UMKM tersebut dalam mendapatkan pinjaman modal. Menurut Kieso (2011) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Menurut Putri dalam Lutfiaazahra (2015), terkait kondisi seperti diatas, untuk mempermudah UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, maka pada tanggal 17 Juli 2009 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan standar akuntansi khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan disahkan pada tanggal 19 Mei 2009 oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia) kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Standar akuntansi untuk UMKM ini dikenal dengan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). SAK ETAP diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011.

Salmiah dkk. (2015), menyatakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. SAK ETAP disusun dan diterbitkan untuk menjadi pedoman atau acuan menyusun laporan keuangan bagi UMKM. Entitas yang dimaksud dalam SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Namun pada kenyataannya, banyak perusahaan UMKM yang belum melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andriani, dkk. (2014) yang berjudul Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada UMKM (Sebuah Studi Intrepetatif pada Peggy Salon), mengungkapkan bahwa pelaku UMKM tidak atau belum menerapkan SAK ETAP dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena kurang luasnya sosialisasi pemerintah tentang SAK ETAP bagi pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, terdapat kendala-kendala bagi pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang mengacu SAK ETAP. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Jika membayar akuntan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, merasa terlalu mahal. Menurut Elisabeth dan Hermon (2012), dalam penelitiannya menyatakan bahwa

kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan antara lain kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu yang ada lebih difokuskan pada kegiatan operasional usaha. Diharapkan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih lagi kepada pelaku UMKM dalam sosialisasi dan pembinaan khususnya tentang pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.

Seperti halnya UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Banyak pengusaha UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Hal ini menimbulkan keinginan penulis melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Pencatatan keuangan yang dilakukan, persepsi tentang SAK ETAP dan mencoba menerapkan akuntansi berupa laporan keuangan SAK ETAP untuk membantu memudahkan pelaku UMKM tersebut dalam melakukan pencatatan dan penyusunannya. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat membantu mengevaluasi usahanya oleh pemilik UMKM dan dapat dijadikan sebagai dasar bahan pengambilan keputusan untuk mengembangkan usahanya. Seperti menambah modal dengan melakukan peminjaman ke Bank atau Lembaga Keuangan lain dan juga dapat digunakan yang terkait dengan pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengelola UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengelola UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sudah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?
3. Bagaimana persepsi pengelola UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?
4. Apa kendala-kendala yang dihadapi pengelola UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dalam melakukan penerapan akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?

1.3 Batasan Masalah

Sejalan dengan yang akan diteliti, penelitian ini dibatasi :

1. Penelitian ditujukan pada UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
2. Penerapan akuntansi disesuaikan dengan SAK ETAP.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengelola UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengelola UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, sudah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau belum.
3. Untuk mengetahui persepsi pengelola UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pengelola UMKM di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dalam melakukan penerapan akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan pengetahuan penerapannya yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti untuk terjun langsung di lapangan dan mengetahui perbedaan antara teori dengan kondisi yang sebenarnya lapangan serta untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu dan berusaha memecahkan permasalahan tersebut.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat menjadi salah satu referensi materi perkuliahan yang terkait dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan UMKM.

c. Bagi pihak UMKM

Dapat dijadikan bahan pertimbangan tentang penerapan SAK ETAP pada UMKM agar mengetahui pentingnya akuntansi yang sesuai standar pada bisnis mereka dan dapat mengembangkan usahanya.

